



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ASWIN SAUDO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **625008**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7302 m2/30 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 9126 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 175.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS/ MOBILIO Tahun 2019, HADIAH Rp. 175.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 25.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.278.719**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 959.278.719**III. HUTANG** Rp. 101.514.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 857.764.719

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DISTYAWATY
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 441090

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 951.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 95.000.000

1. MOBIL, KIJANG LSX KAPSUL Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, LAINNYA Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, LAINNYA Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.438.090

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.063.438.090

**III. HUTANG** Rp. 90.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 973.438.090

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HASIM R
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 628033

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 470.000.000

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , WARISAN Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 230.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 71.395.049

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 773.895.049

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 773.895.049

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MADDA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **689743**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.295.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 2.320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/179.66 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1650 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , LAINNYA Rp. 175.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , LAINNYA Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 2250 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 208.000.000**

1. MOBIL, FORD SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, ESPASS MOBIL BOX Tahun 1987, LAINNYA Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2SV/SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 61.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	630.389
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.564.630.389
III. HUTANG	Rp.	995.155.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.569.474.889

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHYU AGUST PRATAMA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 646988

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.849.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/432 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1062 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 159.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 835 m2/490 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 1974 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 699 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
6. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
7. Tanah Seluas 1062.5 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 7666 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 835 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
10. Tanah Seluas 1811 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 230.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, NISSAN TERRANO MOBIL PENUMPANG/MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	50.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	590.126.648
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.719.426.648
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	2.719.426.648

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.